



Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Raudatuzzahra*, Fadli

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Bengkulu, Bengkulu
Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Sumatera, Bengkulu, Indonesia

Email: ¹*rararauza09@gmail.com, ²fadli@unib.ac.id

Email Penulis Korespondensi: rararauza09@gmail.com

Submitted: 25/07/2025; Accepted: 31/08/2025; Published: 31/08/2025

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara. Kajian ini menggunakan purposive sampling. Data yang digunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang di sebarakan kepada 217 responden dengan kriteria sampel Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Teknik pengolahan data dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS) yang dibantu oleh software SmartPLS. Temuan dari penelitian ini koefisien jalur transparansi ke kepercayaan masyarakat sebesar 0,277 dengan T-statistik 2,389 dan p value = 0,008, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebesar 0,277 satuan, dan pengaruh ini signifikan pada $\alpha = 5\%$ (karena $p < 0,05$). Sedangkan akuntabilitas memiliki koefisien jalur 0,588, T-statistik 5,002, dan $p < 0,001$, yang berarti kenaikan satu satuan akuntabilitas meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 0,588 satuan, dengan tingkat signifikansi yang jauh lebih kuat. Dari hasil uji ini maka transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dapat di terima.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Tingkat Kepercayaan Masyarakat; Transparansi

Abstract—This study aims to examine the effect of transparency and accountability in village financial management on the level of community trust in North Bengkulu Regency. This study uses purposive sampling. The data used were primary data collected through questionnaires distributed to 217 respondents with sample criteria for the Village Consultative Body (BPD). The data processing technique was carried out using the Partial Least Square (PLS) method assisted by SmartPLS software. The findings of this study are the path coefficient of transparency to public trust of 0.277 with a T-statistic of 2.389 and p value = 0.008, indicating that every one unit increase in transparency will increase public trust by 0.277 units, and this effect is significant at $\alpha = 5\%$ (because $p < 0.05$). Meanwhile, accountability has a path coefficient of 0.588, a T-statistic of 5.002, and $p < 0.001$, which means that a one-unit increase in accountability increases the level of public trust by 0.588 units, with a much stronger level of significance. From the results of this test, transparency and accountability have a positive effect on the level of public trust.

Keywords: Accountability; Level of Public Trust; Transparency

1. PENDAHULUAN

Pemerintah desa memiliki peran yang penting dalam pengelolaan keuangan desa guna untuk membangun pemerintahan yang makmur, sejahtera dan pemerintah juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Indikator dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah integritas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, pengelolaan dana desa masih menghadapi sejumlah persoalan dan hambatan yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Permasalahan tersebut mencakup ketidakjelasan dalam penentuan alokasi dana, penggunaan anggaran yang kurang optimal, serta minimnya akuntabilitas dan keterbukaan informasi. Faktor-faktor inilah yang bisa berdampak negatif terhadap persepsi masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa (Edtiyarsih & Izzabillah, 2023 dan Hariani & Alang, 2019). Oleh karena itu, dalam konteks ini diperlukan penerapan pendekatan berdasarkan teori legitimasi. Menurut Shafirah Pratama et al. (2022), teori legitimasi menjelaskan bahwa pemerintah perlu menjaga dan memperkuat kedudukan sosialnya dengan memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan sesuai dengan nilai serta norma yang berlaku dan diterima oleh masyarakat. Hal ini penting mengingat masyarakat merupakan bagian dari pemangku kepentingan (stakeholder) yang memiliki kontribusi besar dalam proses pembangunan daerah (Suryani & Robiansyah, 2022). Tingkat kepercayaan masyarakat adalah suatu kondisi psikologis yang mencerminkan keyakinan seseorang terhadap perilaku dan niat orang lain dalam konteks hubungan sosial (Prihatin & Mustaqim, 2023). Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa merupakan aspek penting, Untuk menciptakan kontrak sosial yang baik antara pemerintah dan masyarakat maka konsep teori legitimasi sangat mendukung keselarasan tindakan pemerintah dengan harapan publik (Andayani et al., 2024).

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di Kabupaten Bengkulu Utara belum cukup baik, hal ini disebabkan beberapa kasus seperti di Desa Talang Renah Kecamatan Air Besi adanya kecurangan pengalokasian dana desa tahun anggaran 2023 (Tubar news.com, 2024). Lalu mantan Kepala Desa Talang Rasau, Kecamatan lais, kabupaten Bengkulu Utara, terbukti melakukan penyelewengan dana desa senilai ratusan juta rupiah. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi (TintaRakyat.id.com, 2024). Hal ini mencerminkan bahwa kurangnya internal control dalam pe.

Menurut Maulana & Ridwan, (2020) Transparansi merujuk pada sikap terbuka yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses pengelolaan sumber daya publik, sehingga informasi tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Menurut Putri dan Kuswanti



(2020), transparansi dapat dipahami sebagai praktik penyampaian informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada publik, didasari oleh prinsip bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh akses penuh terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah. Hal ini mencakup bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang ada serta sejauh mana ketaatannya terhadap regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, transparansi dipandang sebagai suatu prinsip dasar yang menjamin masyarakat desa memiliki hak dan kebebasan untuk mengakses informasi, Terutama yang menyangkut kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa, mulai dari proses perumusannya, tahapan implementasinya, hingga capaian atau output yang dihasilkan. Transparansi dalam hal ini menjadi sangat krusial, karena pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik yang seluruhnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas (Ngakil & Kaukab, 2020).

Menurut Djafar et al., (2024) Akuntabilitas merupakan suatu jenis pertanggungjawaban yang berlaku pada seluruh kegiatan dan pekerjaan dalam rangka melaksanakan tugas organisasi serta mempunyai rasa tanggung jawab yang kuat. Pertanggung jawaban yang berlaku pada seluruh kegiatan dan pekerjaan dalam rangka melaksanakan tugas organisasi serta mempunyai rasa tanggung jawab yang kuat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur mengenai tata kelola keuangan desa, regulasi ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di tingkat desa secara transparan, partisipatif, tertib, dan akuntabel, akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk menjelaskan pertanggungjawaban terkait kinerja dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya, serta komitmen untuk menjalankan kebijakan. Akuntabilitas memiliki peran yang sangat krusial, tidak hanya sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang wajib disampaikan oleh pemerintah desa, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjalin keterhubungan antara pemerintah desa dengan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dalam proses pengelolaan dana desa (Imawan et al., 2019).

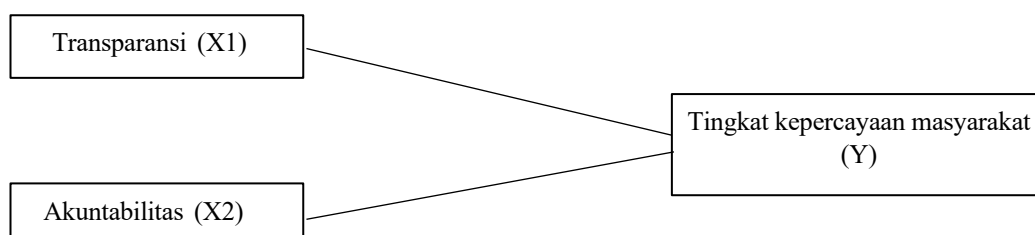
Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan publik, masih terdapat sejumlah kesenjangan riset yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Sebagian besar studi terdahulu hanya menitikberatkan pada aspek transparansi, sementara akuntabilitas belum banyak diuji secara simultan dengan transparansi dalam membangun kepercayaan masyarakat (Setyaningrum et al., 2024). Selain itu, penelitian yang berfokus pada pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah desa masih relatif terbatas, padahal desa merupakan unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat yang secara langsung mengelola dana desa (Yuli Susanti et al., 2019). Di sisi lain, hasil penelitian yang telah ada menunjukkan temuan yang belum konsisten, di mana ada studi yang menyatakan transparansi maupun akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, tetapi ada pula yang menemukan pengaruh yang tidak signifikan (Ramadhan et al., 2025). Dari segi metodologi, sebagian besar penelitian menggunakan regresi linier sederhana atau analisis deskriptif, sedangkan penggunaan metode statistik yang lebih komprehensif seperti SEM-PLS masih jarang dilakukan, padahal dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai hubungan antarvariabel, termasuk peran mediasi atau moderasi (Adimuntja et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji secara simultan peran transparansi dan akuntabilitas dalam memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan analisis yang lebih komprehensif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa di Kabupaten Bengkulu Utara. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk memperkuat kepercayaan masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif, yakni suatu metode yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis gejala berdasarkan data numerik (Anisa, 2023). Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori kausal, yang bertujuan mengidentifikasi dan menguji hubungan sebab-akibat antar variabel dalam konteks tertentu. Dalam hal ini, pendekatan tersebut memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana transparansi serta akuntabilitas memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Sejalan dengan pendapat (Sugiyono (2017) penelitian kuantitatif sangat cocok untuk menjelaskan pengaruh antar variabel secara objektif, sistematis, dan terukur dalam ruang lingkup tertentu seperti studi ini di Kabupaten Bengkulu Utara. Pada Gambar 1 berikut merupakan kerangka penelitian dalam penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Penelitian



Gambar 1 menunjukkan kerangka penelitian yang digunakan dalam studi ini, di mana terdapat dua variabel independen yaitu transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2), serta satu variabel dependen yaitu tingkat kepercayaan masyarakat (Y). Transparansi dalam penelitian ini dipahami sebagai keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara mudah dan jelas. Sementara itu, akuntabilitas merujuk pada bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas pelaksanaan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Kedua variabel independen tersebut diasumsikan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, yakni keyakinan masyarakat terhadap integritas, kejujuran, dan kompetensi aparat desa dalam mengelola keuangan desa. Hubungan yang ditunjukkan dalam kerangka penelitian ini menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas, maka semakin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

2.2 Populasi dan Sampel

Menurut Fajri dan Julita (2021), populasi mencakup seluruh objek atau subjek yang diteliti, sementara sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan. Dalam penelitian ini, populasi adalah masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara, dan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Responden difokuskan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan anggota, untuk memastikan relevansi jawaban dan meminimalkan bias normatif. Penentuan jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad (1)$$

Perhitungan jumlah sampel penelitian dapat dilakukan menggunakan rumus Slovin, yang dirancang untuk menentukan jumlah responden yang representatif dari suatu populasi dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan (margin of error) yang dapat ditoleransi. Rumus ini dituliskan sebagai $n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$, di mana n adalah jumlah sampel yang dibutuhkan, N merupakan jumlah populasi, dan e adalah margin of error. Dalam penelitian ini, margin of error yang digunakan adalah 0,10 atau 10%, yang berarti peneliti masih menerima kemungkinan kesalahan sebesar 10% dalam generalisasi hasil.

Tabel 1. Perhitungan sampel

Kabupaten	Jumlah desa	Jumlah (BPD)
Air besi	15	75
Air napal	12	60
Air padang	8	40
Arma jaya	11	55
Batik nau	15	75
Enggano	6	30
Giri Mulya	6	30
Hulu palik	15	75
Kerkap	17	85
Ketahun	11	55
Kota arga makmur	16	80
Lais	13	65
Marga sakti seblat	9	45
Napal putih	10	50
Padang jaya	12	60
Pinang raya	10	50
Putri hijau	9	45
Tanjung agung palk	9	45
Ulok kupai	8	40
Total	212	1.060

Perhitungan sampel :

$$n = 1.060 / (1 + 1.060 \times 0,10^2)$$

$$n = 1.060 / (1 + 1.060 \times 0,01)$$

$$n = 1.060 / (1 + 10,6)$$

$$n = 1.060 / 11,6$$

$$n = 91,37$$

Dari rumus slovin (persamaan 1) jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 100 sampel minimum.

2.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer sebagai dasar analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui distribusi kuesioner digital yang dibagikan dalam bentuk Google Form.



Responden diminta untuk menjawab secara tertulis setiap pertanyaan yang tersedia (Rivera et al., 2024). Waktu mengumpulkan data selama 3 bulan dengan memperoleh 217 responden. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan metode regresi yang diolah menggunakan perangkat lunak statistik SmartPLS versi 4.

Tabel 2. Pengukuran variabel

Variabel	Indikator	Sumber
Transparansi (X1)	1) Hak masyarakat memperoleh informasi	Sari&Wahidahwati, (2018)
	2) Keterbukaan informasi	
	3) Keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa	
	4) Adanya pertanggungjawaban pengelolaan dana desa	
	5) Adanya pengawasan dari tim pelaksana	
Akuntabilitas (X2)	1. Perencanaan	Sari&Wahidahwati, (2018)
	2. Pelaksanaan dan pengawasan	
	3. Pertanggungjawaban	
Tingkat kepercayaan masyarakat (Y)	1. Integritas	Ardelia, (2022)
	2. Kompetensi	
	3. Keadilan	
	4. Transparansi	
	5. Akuntabilitas	

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan kuisioner yang telah disebar, diperoleh 217 responden yang sesuai dengan kriteria sampel penelitian. Berikut ini disajikan gambaran demografi responden berdasarkan jenis kelamin dan jabatan BPD.

Tabel 3. Demografi Responden

Uraian	Responden	
	Orang	Persentase
Jenis Kelamin:		
Laki-Laki	104	47,9%
Perempuan	113	52,1%
Total	217	100%
Jabatan BPD		
Ketua	18	8,4%
Wakil Ketua	26	12,19%
Sekretaris	38	17,7%
Bendahara	33	15,3%
Anggota	100	46,5%
Total	217	1000%

Berdasarkan **Tabel 3**, dapat diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 217 orang. Jika dilihat dari jenis kelamin, responden terdiri atas 104 orang laki-laki (47,9%) dan 113 orang perempuan (52,1%). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki, sehingga keterwakilan gender dalam penelitian ini relatif seimbang. Selanjutnya, jika ditinjau dari jabatan responden dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diperoleh komposisi yang beragam. Responden yang menjabat sebagai Ketua BPD berjumlah 18 orang (8,4%), Wakil Ketua sebanyak 26 orang (12,19%), Sekretaris sebanyak 38 orang (17,7%), Bendahara sebanyak 33 orang (15,3%), dan yang terbanyak adalah Anggota BPD yaitu 100 orang (46,5%). Dari distribusi ini terlihat bahwa mayoritas responden adalah anggota BPD, sedangkan sisanya tersebar pada jabatan struktural lainnya.

3.1.2 Analisa Model Pengukuran

Dalam penelitian ini, penilaian terhadap model pengukuran (outer model) meliputi tiga komponen utama, yaitu validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas komposit. Validitas konvergen diuji untuk memastikan bahwa tiap indikator dalam suatu konstruk secara konsisten mencerminkan variabel laten yang diukur, dengan syarat nilai Average Variance Extracted (AVE) tidak kurang dari 0,50. Kemudian, validitas diskriminan ditinjau melalui kriteria Fornell–Larcker untuk memastikan bahwa setiap konstruk memiliki keunikan empiris dibanding konstruk lainnya. Terakhir, reliabilitas komposit digunakan untuk mengukur kesesuaian internal antar indikator dalam suatu konstruk, di mana nilai Composite Reliability (CR) harus melebihi 0,70. Ketiga tolok ukur ini menjadi acuan dalam memastikan bahwa instrumen penelitian telah valid dan reliabel sebelum analisis model struktural dilakukan.



3.1.3 Convergent Validity

Validitas konvergen menunjukkan sejauh mana indikator-indikator yang membentuk suatu variabel saling berhubungan erat dan benar-benar mencerminkan konstruk yang sama. Proses penilaiannya dilakukan dengan memeriksa nilai outer loading setiap indikator, di mana nilai minimal yang direkomendasikan adalah 0,7 untuk menyatakan sebuah indikator valid. Apabila ditemukan indikator dengan loading di bawah ambang batas tersebut, maka indikator itu perlu dihapus atau disempurnakan agar model penelitian menjadi lebih kokoh dan memenuhi standar validitas.

Tabel 4. Nilai Loading Factor

Variabel	Item	Loading Factor	Keterangan
Transparasi (X1)	X1.2	0,746	Valid
	X1.3	0,807	Valid
	X1.4	0,790	Valid
	X1.5	0,728	Valid
	X1.6	0,800	Valid
	X1.7	0,794	Valid
	X1.8	0,770	Valid
	Akuntabilitas (X2)	X2.1	0,720
X2.2		0,778	Valid
X2.3		0,768	Valid
X2.4		0,775	Valid
X2.5		0,740	Valid
X2.6		0,783	Valid
X2.7		0,836	Valid
X2.8		0,832	Valid
Tingkat Kepercayaan Masyarakat (Y)	Y1.1	0,749	Valid
	Y1.2	0,783	Valid
	Y1.3	0,750	Valid
	Y1.4	0,791	Valid
	Y1.5	0,774	Valid
	Y1.6	0,703	Valid

Analisis awal pada model pengukuran mengungkap bahwa indikator X1.1 memiliki nilai outer loading di bawah 0,7, sehingga belum secara memadai menggambarkan konstruk yang dimaksud dan validitas konvergen belum tercapai. Untuk memperbaiki hal ini, indikator yang tidak memenuhi ambang batas tersebut dihapus dari model. Setelah evaluasi ulang, seluruh indikator yang tersisa menunjukkan outer loading di atas 0,7. Dengan demikian, model pengukuran kini telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, sehingga dapat digunakan untuk analisis model struktural berikutnya.

3.1.4 Discriminant Validity

Validitas diskriminan menilai sejauh mana setiap konstruk dalam model penelitian benar-benar berbeda secara empiris dari konstruk lainnya. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan kriteria Fornell–Larcker, di mana setiap konstruk harus menunjukkan kuadrat nilai Average Variance Extracted (AVE) yang lebih tinggi dibandingkan dengan koefisien korelasinya dengan konstruk lain. Dengan demikian, setiap konstruk dapat dipastikan memiliki keunikan pengukuran yang memadai dalam model.

Tabel 5. Nilai Discriminat Validity

Variabel	AVE
Transparasi	0,603
Akuntabilitas	0,608
Tingkat Kepercayaan Masyarakat	0,576

Setelah diuji, setiap konstruk terbukti mampu menjelaskan varians indikatornya sendiri lebih dominan dibandingkan varians yang tumpang tindih dengan konstruk lain. Berdasarkan kriteria Fornell–Larcker, kuadrat nilai (AVE) pada masing masing konstruk ternyata lebih tinggi daripada korelasi antar konstruk, menandakan tidak adanya masalah diskriminasi. Dengan demikian, model penelitian ini valid dan dapat diandalkan untuk mengukur konstruk konstruk yang dikaji.

3.1.5 Composite Reliability

Composite Reliability (CR) merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi konsistensi internal antar indikator dalam sebuah konstruk laten, sehingga menjamin ketepatan pengukuran variabel. Saat nilai CR mencapai 0,7 atau lebih, hal ini mengindikasikan bahwa indikator indikator tersebut dapat diandalkan dalam merefleksikan



konstruk yang diteliti. Dengan demikian, instrumen dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi dan model penelitian layak untuk melanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

Tabel 6. Nilai Composite Reliability

Variabel	Cronbach's alpha	Rho_c
X1 Transparansi	0,890	0,914
X2 Akuntabilitas	0,907	0,925
Y Tingkat Kepercayaan Masyarakat	0,852	0,891

Ketiga variabel menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat baik. Variabel Transparansi (X1) memiliki Cronbach's alpha 0,890 dan Rho_c 0,914, sedangkan Akuntabilitas (X2) mencatat nilai masing masing 0,907 dan 0,925. Variabel tingkat kepercayaan masyarakat (Y) juga kuat dengan Cronbach's alpha 0,852 dan Rho_c 0,891. Karena semua nilai Cronbach's alpha dan Rho_c berada di atas ambang minimal 0,70, dapat disimpulkan bahwa instrumen pengukuran untuk setiap variabel konsisten dan andal.

3.1.6 Model Struktural

Dalam Partial Least Squares (PLS), Pendekatan struktural dimanfaatkan untuk menelaah hubungan sebab-akibat antar variabel dalam suatu model penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen, baik melalui pengaruh langsung maupun melalui jalur tidak langsung.

Tabel 7. Nilai R-Square Model

	R-square	Adjuste R-square
(Y) Tingkat Kepercayaan Masyarakat	0,728	0,725

Model regresi menunjukkan nilai R-square sebesar 0,728, yang berarti sekitar 72,8% variasi tingkat kepercayaan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas dalam model. Setelah disesuaikan dengan jumlah parameter, Adjusted R-square sebesar 0,725 mengindikasikan bahwa 72,5% variasi tersebut tetap terwakili dengan baik, sehingga model memiliki kemampuan prediksi yang kuat.

Tabel 8. Nilai F-Square Model

Y. Tingkat Kepercayaan Masyarakat	
X1 Transparansi	0,037
X2 Akuntabilitas	0,165

Nilai F Square menunjukkan bahwa transparansi (X1) memiliki efek kecil terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dengan nilai 0,037, artinya kontribusi langsung transparansi dalam menjelaskan varians kepercayaan masyarakat tergolong rendah. Sebaliknya, akuntabilitas (X2) memberikan efek sedang dengan nilai 0,165, yang menandakan bahwa akuntabilitas memiliki peranan lebih signifikan dalam membentuk kepercayaan publik dibandingkan transparansi. Secara keseluruhan, kedua variabel berkontribusi positif.

3.1.7 Inner Weight

Inner weight di PLS adalah bobot yang menggabungkan indikator menjadi skor variabel laten sembari mencerminkan kekuatan dan arah pengaruh antar variabel laten dalam model kausal. Dengan inner weight, skor variabel laten terbentuk sesuai hubungan sebab-akibat yang dihipotesiskan.

Tabel 9. Hasil Dari Path Coefficient

Hubungan	Original Sample	T Statistik	P Values
X1 Transparansi -> Y Tingkat Kepercayaan Masyarakat	0,277	2,389	0,008
X2 Akuntabilitas -> Y Tingkat Kepercayaan Masyarakat	0,588	5,002	0,000

Berdasarkan hasil analisis, kedua variabel bebas transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat (Y) pada taraf signifikansi 5%. Koefisien jalur transparansi ke kepercayaan masyarakat sebesar 0,277 dengan T-statistik 2,389 dan p = 0,008, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebesar 0,277 satuan, dan pengaruh ini signifikan pada $\alpha = 5\%$ (karena $p < 0,05$). Sedangkan akuntabilitas memiliki koefisien jalur 0,588, T-statistik 5,002, dan $p < 0,001$, yang berarti kenaikan satu satuan akuntabilitas meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 0,588 satuan, dengan tingkat signifikansi yang jauh lebih kuat. Dengan demikian, meski keduanya berperan penting, akuntabilitas memberikan kontribusi yang lebih besar dalam membangun kepercayaan publik dibandingkan transparansi.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Transparansi terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat



Hasil uji yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan antara Hipotesis pertama, yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin terbuka pemerintah desa dalam menyajikan informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana desa, semakin besar pula kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan di tingkat desa. Kebijakan transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau proses pengelolaan dana secara langsung, sehingga persepsi bahwa pemerintah bekerja secara jujur dan akuntabel semakin menguat.

Penerimaan hipotesis ini selaras dengan Teori Legitimasi, yang menekankan pentingnya “kontrak sosial” antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip keterbukaan sesuai norma dan nilai yang berlaku, pemerintah desa membangun legitimasi sosialnya. Transparansi data keuangan bukan hanya memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, tetapi juga mencerminkan keselarasan tindakan pemerintah dengan harapan publik, sehingga dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas desa terus terjaga.

Penelitian terdahulu juga mendukung temuan ini. Djafar et al., (2024) menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara transparansi laporan keuangan desa dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, Avellyni & Making, (2023) menegaskan bahwa keterbukaan informasi kebijakan publik memperkuat partisipasi warga dan memupuk kepercayaan mereka. Temuan Imamah et al. (2023) semakin memperkuat bahwa akses transparan terhadap data yang andal merupakan kunci untuk memupuk kepercayaan jangka panjang dalam tata kelola pemerintahan desa.

3.2.2 Akuntabilitas terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dapat diterima. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah desa secara konsisten melaporkan pertanggungjawaban keuangan dan menjalankan prosedur administrasi secara terbuka, masyarakat merespons dengan meningkatnya keyakinan terhadap integritas dan kompetensi aparat desa. Penerimaan hipotesis ini menegaskan pentingnya mekanisme pelaporan dan audit internal yang efektif sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan publik.

Teori Legitimasi memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menjelaskan mengapa akuntabilitas mampu memperkuat kepercayaan masyarakat. Menurut teori ini, organisasi termasuk pemerintahan desa harus selaras dengan norma, nilai, dan ekspektasi sosial untuk mempertahankan dukungan publik jangka panjang. Dengan mempraktikkan akuntabilitas, pemerintah desa tidak hanya memenuhi “kontrak sosial” dengan masyarakat, tetapi juga menegaskan komitmen mereka terhadap transparansi, keadilan, dan kepatuhan pada regulasi. Kondisi inilah yang secara teoritis mendasari peningkatan legitimasi dan, pada gilirannya, kepercayaan masyarakat.

Hasil ini juga sejalan dengan studi-studi sebelumnya. Alfiani & Estiningrum (2021) menemukan bahwa pelaporan keuangan yang terstruktur dengan baik dan pelibatan masyarakat dalam proses audit desa mampu menurunkan kecurigaan publik dan meningkatkan partisipasi warga. Begitu pula Latif et al. (2021) menyimpulkan bahwa akuntabilitas yang dipertegas melalui mekanisme umpan balik komunitas berkontribusi pada penguatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan setempat. Penelitian-penelitian tersebut mendukung bukti empiris bahwa akuntabilitas merupakan pendorong utama kepercayaan publik di lingkungan desa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh signifikan dan positif dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ketika pemerintah desa secara terbuka menyampaikan informasi mengenai distribusi dan pemanfaatan dana desa, kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan desa cenderung meningkat. Temuan ini konsisten dengan Teori Legitimasi, yang menjelaskan bahwa legitimasi sosial diperoleh ketika tindakan pemerintah sesuai dengan nilai dan harapan masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam mengawasi proses pengelolaan keuangan, sehingga tercipta persepsi bahwa pemerintah desa bersikap jujur, akuntabel, dan bertanggung jawab. Penelitian ini juga diperkuat oleh studi sebelumnya yang menemukan adanya hubungan antara keterbukaan informasi publik dan meningkatnya kepercayaan serta partisipasi warga dalam pemerintahan desa. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa turut memberikan dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Ketika aparat desa menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan sesuai prosedur yang berlaku, masyarakat menunjukkan respons yang positif, berupa tumbuhnya kepercayaan terhadap integritas serta kualitas kinerja pemerintah desa. Temuan ini memperkuat relevansi Teori Legitimasi, di mana akuntabilitas menjadi bentuk nyata dari pemenuhan kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat, serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan legitimasi dan dukungan publik. Namun demikian, Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: Penggunaan kuesioner daring dan hanya mengandalkan persepsi subjektif responden. Selain itu, variabel yang digunakan masih terbatas pada transparansi, akuntabilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat, tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti internal control, partisipasi masyarakat dan pengaruh sosial. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan metode yang lebih beragam dan memasukkan variabel tambahan guna memperoleh hasil yang lebih mendalam dan menyeluruh.

**REFERENCES**

- Adimuntja, R., Setiawan, L., & Karim, A. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Bumd Kota Makassar. *Indonesian Journal of Business and Management*, 7(1), 125–133. <https://doi.org/10.35965/jbm.v7i1.5210>
- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 222-229. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.36125>
- Andayani, S., Zitri, I., & Darmansyah, D. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Di Kelurahan Punia Mataram. *Journal Law and Government*, 2(1). <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.15873>
- Angellicca Rivera, C., Khoirina, S., & Silvia, D. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Purwosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5).
- Aprilia, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2, 109–122. <https://doi.org/10.29303/Akurasi.V2i2.18>
- Buulolo, A., Pardede, P. D. K., & Laia, S. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Hilizalootano Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Governance Opinion*, 9(1), 46-60.
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.24014/Jiq.V17i2.14463>
- Hawaria Djafar, Rio Monoarfa, & Husain, S. P. (2024). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Pemerintah Desa: Studi Kasus: Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 3929–3944. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V6i5.1377>
- Imamah, N., & Halimah, H. (2023). Analisis prinsip transparansi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. *Uquduna: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 1(01), 25-36.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/Jamal.2019.04.10009>
- Kuswanti, A. P. E., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Add, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2).
- Latif, A., Savitri, E., & Susilatri, S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2)
- Making, A. A. L., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(10).
- Maulana, A. F., & Ridwan, R. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris: Masjid Jami' Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2)
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/Jematech.V3i2.1283>
- Prihatin, M., & Mustaqim, F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Desa Lahumoko Kabupaten Buton Utara. *Entries*, 4(2)
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan(Jiask)*, 3(2), 79–90. <https://doi.org/10.48093/Jiask.V3i2.35>
- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada Desa Songan B kecamatan Kintamani kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 258-280.
- Ramadhan, P. (2025). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran dengan Efektivitas Anggaran sebagai Variabel Intervening pada RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 9(1)
- Rijani, M., Munawarah, M., & Mahdalina, M. (2024). Efektivitas Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Muara Payang Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2)
- Sardjan, B. (2024). Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ilmiah Neraca*, 7(1), <https://doi.org/10.56070/jinema.v7i1.103>
- , D. E., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh Transparansi, Asimetri Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1206–1223. <https://doi.org/10.24036/Jea.V5i3.707>
- Setiawan, F., & Rhama, B. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Citaman Jernih



- Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. In *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, 5(3). Setyaningrum, A., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 581–589. <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.104>
- Siringo Ringo, D. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Repository Universitas Medan Area*, <https://Repository.Uma.Ac.Id/Handle/123456789/23639>.
- Susanti, E. Y., & Budiwitjaksono, G. S. (2019). Fraud Diamond Theory dan Kualitas Pengelolaan Keuangan dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 2(2), 207-223.
- Sutisna, D., Nirwansyah, Moch., Ningrum, S. A., & Anwar, S. (2024). Studi Literatur Terkait Peranan Teori Agensi Pada Konteks Berbagai Issue Di Bidang Akuntansi. *KarimahTauhid*, 3, 4802–4821. <https://doi.org/10.30997/Karimahtauhid.V3i4.12973>
- Syamsuddin, I., Muhammad, P. N., & Karim, A. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. *Journal Of Management*, 5(2), 170–177. <https://doi.org/10.2568/Yum.V5i2.1557>
- Yuliandari, E., & Wulandari, S. M. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. *Sovereignty*, 1(4), 745-757.